

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- A.M. Yunus Wahid dan Syamsul Bachrie. 2024. *Metode Penelitian Praktis*. Jakarta: Kencana.
- A.M. Yunus Wahid. 2018. *Hukum Lingkungan*. Jakarta: Kencana.
- _____. 2016. *Pengantar Hukum Tata Ruang*. Jakarta: Prenadamedia.
- Ahmad Muliadi. 2015. *Hak-Hak Atas Tanah*. Bogor: Erzatama Karya Abadi.
- Arba. 2019. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Boedi Harsono. 2003. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria*. Jakarta: Djambatan.
- Dhoni Martine. 2023. *Perlindungan Hukum Data Pribadi*. Makassar: Mitra Ilmu.
- Fauzi Janu Amarrohman dan Onang Onang Fadjar Witjaksono. 2021. *Hukum Agraria*. Semarang: Undip Press.
- Irwansyah. 2021. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Menulis Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Isnaini dan Anggreni Lubis. 2022. *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*. Medan: CV Pustaka Prima.
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at. 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Kahar. 2025. *Penataan Ruang Wilayah Pesisir dan Laut*. Depok: Rajagrafindo.
- Lexi J Moeleong. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Philipus M Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Rahmat Ramadhani. 2024. *Hukum Pertanahan*. Medan: Umsu Press.
- Richard dan Ana Silviana. 2024. *Cessie, Subrogasi, Inovasi dan Kompensasi dalam Hukum Hak Tanggungan*. Bandung: CV Cendekia Press.
- Romli, et al. 2024. *Perlindungan Hukum*. Palembang: Doki Course and Training.
- Satjipto Rahardjo. 2014. *Ilmu Hukum*, Cetakan Kedelapan. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sigit Supto Nugroho, Mohammad Tohari dan Mudji Rahardjo. 2017. *Hukum Agraria Indonesia*. Solo: Pustaka Iltizam.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Takdir Rahmadi. 2018. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Urip Santoso. 2017. *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*. Jakarta: Kencana.
- _____. 2019. *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Jakarta Timur: Kenaca.
- _____. 2015. *Perolehan Hak Atas Tanah*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Waskito dan Hadi Arnowo. 2018. *Pertanahan, Agraria, dan Tata Ruang*. Jakarta: Prenadamedia.

B. Skripsi, Tesis dan Disertasi:

Abusa Mamulati. 2018. *Kepastian Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah Pada Kawasan Permukiman Pesisir Pantai Menurut Pasal 4 Dan 5 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penataan Pertanahan Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil*. Tesis. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Andi Heriaksa. 2022. *Perlindungan Hukum atas Penguasaan Tanah di Wilayah Pesisir Tanjung Balai Karimun*. Tesis. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

C. Jurnal:

Andi Heriaksa dan Hijriani. 2022. *Protection of Rights to The Land of Peoples in Coastal Areas*. International Journal of Management & Education in Human Development. Volume 2 Nomor 1. hlm. 665-668.

Dino Rizka Afdhail dan Taufiqurrohman Syahuri. 2023. *Idealitas Penegakan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum, Jurnal Collegium Studiosum*. Volume 6 Nomor 2. Fakultas Hukum Universitas Veteran Jakarta. hlm. 559.

Fernando Aprizal dan Siti Muslimah. 2019. *Penegakan Hukum Terhadap Kasus Illegal, Unreported, Dan Unregulated Fishing Yang Dilakukan Terhadap Kapal Km Bd 95599 Ts Di Laut Natuna Sesuai Dengan Hukum Internasional*. Volume 5 Nomor 2. Belli Ac Paci. hlm. 87-92.

Indirawati Lestari Siang. 2025. *Legal Protection Of Land Rights Holders Against Land Ownership Disputes*. Sibatik Jurnal. Volume 4 Nomor 3. Lafadz Jaya. hlm. 131-138.

Lailatussyyukriah. 2015. *Indonesia dan Konsep Negara Agraris*. Jurnal Seuneubok. Volume 2 Nomor 1. Program Studi Pendidikan Sejarah. Langsa. hlm. 1-8.

Ni Kadek Principia Pristine Holy. 2025. *Ilegal Coastal Development and Its Environmental Impact: Policy Challenges in Villa Construction Along Den Carik Beach, Buleleng*. Jurnal Pacta Sunt Servanda. Volume 6 Nomor 1. Universitas Pendidikan Ganesha. hlm. 40-46.

Muhammad Fredy Arianto. 2020. *Potensi Wilayah Pesisir di Negara Indonesia*. Jurnal Geografi. Volume 20 Nomor 20. Universitas Negeri Surabaya. hlm. 1-7.

Muhammad Ilham Arisaputra. 2015. *Penguasaan Tanah Pantai dan Wilayah Pesisir di Indonesia*. Perspektif Hukum. Volume 15 Nomor 1. Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya. hlm. 27-44.

Muhammad Taufik. 2013. *Filsafat John Rawls Tentang Teori Keadilan*. Jurnal Studi Islam. Volume 19 Nomor 1. hlm. 41-59.

Samudra Putra Indratanto. 2020. *Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*. Jurnal Ilmu Hukum. Volume 16 Nomor 1. hlm. 88-92.

Sri Susyanti Nur. 2015. *Aspek Hukum Pendaftaran Tanah Bekas Milik Asing sebagai Aset Pemerintah Daerah*. Harlev Hasanuddin Law Review. Volume 1 Nomor 1. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. hlm. 88-100.

Tri Widiyono dan Muhammad Zaki Kurniawan Khan. 2023. *Legal Certainty in Land Rights Acquisition in Indonesia's National Land Law*. Law Reform. Volume 19 Nomor 1. hlm. 128-147.

D. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Kluster Penataan Ruang.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penanganan Perkara Pertanahan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai.

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041.

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar 2015-2034.

Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 520-2105 Tahun 1998.